

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL FISIP UNILA
(SEFILA) - 3 TAHUN 2019

*Agenda Baru Pembangunan Indonesia
Berbasis Local Knowledge*



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG (SEFILA) 3
TAHUN 2019**

**TEMA: AGENDA BARU PEMBANGUNAN INDONESIA
BERBASIS *LOCAL KNOWLEDGE***

BANDAR LAMPUNG, 08 AGUSTUS 2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2019**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
(SEFILA) 3 TAHUN 2019**

**Tema: Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis *Local Knowledge*
Bandar Lampung, 08 Agustus 2019**

Susunan Panitia Pelaksana

Dr. Dedy Hermawan
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan
Dr. Arif Sugiono
Dr. Jenni Wulandari
Arizka Warganegara, Ph.D
Wulan Suciska, M.Si
Damayanti, M.Si
M.Hasbi Kurniawan, M.Si
Tety Mujadilah, M.Si

Steering Committee

Dr. Syarief Makhya
Dr. Bartoven Vivit Nurdin
Dr. Ani Agus Puspawati
Drs. Denden Kurnia Drajat
Drs. Dadang Karya Bakti

Reviewer

Prof. Dr. Yulianto
Intan Fitri Meutia, Ph.D
Unang Mulkhan, Ph.D
Dr. Ari Darmastuti
Dr. Andi Corry
Dr. Suropto

Editor :

Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A
Ita Prihantika, M.A
Moh. Nizar, M.A

Penerbit

FISIP Universitas Lampung
vii + 239 hal : 21 x 29 cm
Cetakan 1, Oktober 2019

ISBN:978-623-91972-0-9

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung, HP. 08154019877
E-mail : sefilafisip@fisip.unila.ac.id, Website : www.sefila.fisip.unila.ac.id
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-623-91972-0-9



KATA PENGANTAR

Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan massa melalui konsentrasi massa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif dan efisien berbasis *e-governance*.

Perkembangan media sosial yang masiv juga telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi) (Prasetyo & Trisyanti, 2018), sebagaimana merebaknya *e-commerce* yang menggeser bisnsi retail (toko fisik). Singkatnya, dalam disruptif akan terjadi *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing* (Khasali, 2018). Tantangan era baru ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sama seperti dalam konsep masa lampau. Revolusi industri 4.0 tidak mungkin hanya dihadapi dengan pengembangan teknologi tanpa melibatkan dinamika sosial di dalamnya. Perlu dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir

Hal tersebut menginisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk mengadakan Seminar FISIP Unila (Sefila) 3 yang mengangkat tema mengenai “**Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge**”. Walaupun mengacu pada konteks ruang dan tempat, pengetahuan lokal (*local knowledge*) memiliki relevansi dalam proses pembangunan, karena memanfaatkan sumber daya yang minimal berbasis karakteristik sosial budaya setempat. Pengetahuan lokal ini dapat ditransfer menjadi kearifan lokal yang bisa dipertukarkan atau dilakukan lintas budaya (World Bank, 1998). Sehingga pengetahuan lokal memiliki elastisitas dalam berbagai masalah dan perubahan, termasuk mewarnai agenda pembangunan di Indonesia

Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan kajian diskusi yang dapat berkontribusi dalam menyediakan alternatif solusi bagi agenda pembangunan di Indonesia menghadapi tantangan perubahan dinamika sosial saat ini. Pada akhirnya, luaran dari Seminar FISIP Unila juga diharapkan dapat terpublikasi melalui prosiding dan jurnal terakreditasi, sehingga hasil kajian dapat bermanfaat secara luas bagi kebutuhan pengembangan akademik dalam bidang sosial politik.

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan prosiding ini dengan penuh kemudahan. Prosiding ini disusun agar akademisi, mahasiswa dan peminat ilmu sosial politik dapat memperluas ilmu tentang ruang lingkup konsep maupun kebijakan ilmu sosial dan politik, khususnya di negara Indonesia, yang disajikan dari berbagai sumber. Walaupun prosiding ini mungkin kurang sempurna namun memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan prosiding ini.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2019
Ketua Panitia SEFILA 2019

Dr. Dedy Hermawan, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMANDIRAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN: SEBUAH HUBUNGAN YANG TAK SELALU SEJALAN (Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya)	1-11
INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DENGAN <i>E- GOVERNMENT</i> (Lies Kumara Dewi dan Henni Kusumastuti).....	13-20
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA (Ita Prihantika, Bambang Utoyo, Tia Panca Rahmadhani, Sutiyo)	21-31
IMPLEMENTASI <i>DIGITAL GOVERNMENT</i> DALAM BIDANG PENDIDIKAN (STUDI TENTANG SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ONLINE PADA BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019) (Eko Budi Sulistio)	33-41
KAJIAN PELUANG PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL AISYIYAH LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN KERENTANAN PEREMPUAN PADA KEJAHATAN NARKOBA (Dwi Wahyu Handayani)	43-49
<i>KERATUAN SEMAKA FOLKLORE: ETHNO-ECOTOURISM MODEL IN LAMPUNG INDIGENOUS MUSEUM TOURISM DEVELOPMENT</i> (Bartoven Vivit Nurdin)	51-59
PENDEKATAN PENGETAHUAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HUTAN MANGROVE (Selvi Diana Meilinda dan Rizca Fiolanda).....	61-69
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAMI: PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Keumala Hayati dan Indra Caniago)	71-74
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA SRITEJOKENCONO, KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Suwarno, Abdul Syani, Pairulsyah, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra).....	75-82
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUDIDAYA PETERNAKAN IKAN AIR TAWARDI DUSUN BUKIT SULA, DESA BANDING AGUNG, KECAMATAN PUDUH PIDADA, KABUPATEN PESAWARAN (Pairulsyah, Yuni Ratnasari, Fuad Abdulgani, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra)	83-87
PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (STUDI KELOMPOK WANITA TANI GUYUP RUKUN PEKON SUKOHARJO II	

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU). (Nurarifah, Rahayu Sulistiowati, dan Nana Mulyana).....	89-93
PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG (Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, Panji Tryatmaja, Vera Yusnita)	95-101
MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Dian Kagungan, Yulia Neta dan Hari Kaskoyo).....	103-112
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN DI PULAU PASARAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Ali Imron, Dewie Brima Atika, Eko Budi Sulistio)	113-120
NEO NASIONALISME DAN REVOLUSI DIGITAL DI INDONESIA (Thomas Tokan Pureklolon)	121-127
NEW MEDIA SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA LAMPUNG (Agus Mardihartono dan Yuli Evadianti).....	129-134
KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI DIGITAL: POTENSI PEMBERDAYAAN PEBISNIS MILENIAL (Keumala Hayati dan Indra Caniago).....	135-138
PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (Herlintati, Fery Hendi Jaya, M. Fikri Akbar).....	139-143
KUALITAS LAYANAN, HARGA, DAN PERSEPSI BENEFIT MENGGUNAKAN FITUR <i>GO-PAY</i> (Ni Putu Widiyawati, Arif Sugiono, Diang Adistyia, Jeni Wulandari).....	145-157
PERILAKU KOMUNIKASI MASYARKAT TERHADAP PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN: STUDI PEMAKNAAN TERHADAP POSTING INFOGRAFIS TIRTO.ID (Purwanto Putra)	159-167
PELINDUNGAN BAHASA LAMPUNG DALAM PERUBAHAN BUDAYA DI PROVINSI LAMPUNG (Bendi Juantara dan Indra Bulan).....	169-176
APLIKASI <i>FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)</i> DALAM ADMINISTRASI DIGITAL (Hani Damayanti Aprilia, Mediya Destalia, Ida Vivi Pusvitha).....	177-184
NEGARA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI: MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI (Gita Paramita Djausal, Fitri Juliana Sanjaya, Eris Ardeanto)	185-189
PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BERBASIS <i>E-COMMERCE</i> BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Roby Rakhmadi)	191-196
ANALISIS KONTEN INFORMASI <i>E-GOVERNMENT</i> PADA SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Eka Yuda Gunawibawa, Hestin Oktiani, Gita Hilmi Prakoso)	197-206
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA INDUSTRI PARIWISATA (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI LAMPUNG SELATAN) (Dedy Hermawan dan Simon S. Hutagalung).....	207-217

PENGARUH KUALITAS LAYANAN WEBSITE TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KONSUMEN LAZADA.CO.ID DI BANDAR LAMPUNG Anindhyta Sekar Wangi, Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, dan Mudji Rachmat Ramelan.....	2019-226
<i>SUCCESS FACTORS FOR SERVICE INNOVATION THE DJKI OF COPYRIGHT ONLINE RECORDING SYSTEM</i> Dian Sari dan Erlin Windia Ambarsari	227-235
LAMPIRAN	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL (Bustanul Arifin)	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS “PENGETAHUAN LOKAL” (Muhammad Najib Azca)	
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SDM DI LAMPUNG (Nina Yudha Aryanti)	

KAJIAN PELUANG PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL AISYIYAH LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN KERENTANAN PEREMPUAN PADA KEJAHATAN NARKOBA

Dwi Wahyu Handayani

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

korespondensi: dwi.wahyuhandayani@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Gerakan perempuan yang telah mapan seperti Nasyyiatul Aisyiyah (NA) telah memiliki analisis situasi yang responsif terhadap persoalan kerentanan perempuan pada kejahatan narkoba. Namun, analisis kritis tetap perlu dilakukan dalam merumuskan kontribusi masing-masing pimpinan wilayah NA agar mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan pusat berupa program dan kegiatan. Artikel ini berupa opini yang berupaya mengkaji peluang NA Wilayah Lampung, dilihat pada upaya mewujudkan karakteristik gerakan perempuan yaitu aktivis, kelembagaan dan pelibatan aspek lintas sektoral.

Kata kunci: S Kajian Peluang, Nasyyiatul Aisyiyah, Kerentanan Perempuan, Kejahatan Narkoba

PENDAHULUAN

43

Gerakan perempuan Nasyyiatul Aisyiyah (NA), yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah, menjelang kiprah 1 abadnya pada tahun 2031 memiliki visi putri Islam yang progresif, bermartabat, mendunia dalam menggerakkan peradaban dan komunitas lokal. Sepanjang ini, NA telah berupaya memperjuangkan pemberdayaan untuk perempuan, keadilan dan kesetaraan. NA mengalami perkembangan dalam menerapkan pemikiran gender dan feminisme, yang memiliki kekhasan dibandingkan gerakan lainnya. Kajian gender yang dilekatkan pada upaya merespon persoalan kontemporer berupa keamanan kemanusiaan pada periode 1980-1984, yaitu kampanye pencegahan HIV/AIDS bahkan NAPZA, dalam dakwah dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan agenda Muhammadiyah, bersinergi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya NA periode 2004-2008 telah mencanangkan cita-citanya tahun 2020, yaitu mampu mewujudkan sebagai sumber pembelajaran untuk keluarga (*family learning centre*), antara lain berupa lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap permasalahan anak dan perempuan. Ini dua hal yang menarik, perhatian NA sebagai organisasi yang memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap permasalahan anak dan perempuan, diantaranya pencegahan dan penanganan kerentanan pada kejahatan narkoba.

Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba (Muhammad Radityo Priyasmoro: 2018). Tahun 2018, sebanyak 3,21 persen pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa atau setara dengan 2,287 juta jiwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba (Walda Marison: 2018). Sementara aspek gender pada penyalahgunaan narkoba, dari 30 juta yang terlibat pada tahun 2010 sebanyak 0,0026 persen di antaranya adalah perempuan. Perempuan Indonesia yang memilih menjadi kurir narkoba dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari kemiskinan yang membelit, gaya hidup konsumtif, serta perempuan yang kecanduan narkoba dan seks bebas akhirnya tergelincir juga menjadi pengedar (www.kemenpppa.go.id: 2016).

Salah satu data kondisi penyalahgunaan narkoba oleh perempuan adalah data warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung yang berlokasi di Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Lapas perempuan ini dihuni oleh 270 narapidana dan tahanan perempuan (Data per 15 Maret 2019). Sebagian besar dilatarbelakangi atas keterlibatan pada kasus kejahatan narkoba. 84 % sebagai bandar atau pengedar dan 11 % sebagai pengguna. Selebihnya karena kejahatan korupsi dan human trafficking (<http://smslap.ditjen.go.id>: 2019). Oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji "Bagaimana Peluang Pimpinan Wilayah Nasyyiatul

PEMBAHASAN

Narkotika: Kejahatan Lintas Batas Negara

Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih. Modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*). *Transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara tanpa terkecuali hal ini termasuk Indonesia yang dijadikan sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*).

Perempuan dalam Kerentanan Pada Narkotika

Perempuan menghadapi kerentanan terhadap kejahatan narkoba, baik ketika perempuan menjadi pengguna maupun non pengguna. Pada sisi perempuan akhirnya menjadi pengguna, bahwa ternyata perempuan lebih banyak menghadapi persoalan pada kondisi kesehatan mental/jiwanya. Tabel 1 ini menginformasikan bahwa perempuan rentan terhadap kondisi depresi.

Handayani:
Kajian Peluang
Pimpinan
Nasyiatul Aisyiyah
Lampung dalam
Pencegahan...

Tabel 1. Kesehatan Mental Berbasis Gender

Disorder	Share of global population with disorder (2017) [difference across countries]	Number of people with the disorder (2017)	Share of males:females with disorder (2017)
Any mental or substance use disorder	13% (11-18%)	970 million	12.6% males 13.3% females
Depression	3.4% [2-6%]	264 million	2.7% males 4.1% females
Anxiety disorders	3.8% [2.5-7%]	284 million	2.8% males 4.7% females
Bipolar disorder	0.6% [0.3-1.2%]	46 million	0.55% males 0.65% females
Eating disorders (clinical anorexia & bulimia)	0.2% (0.1-1%)	16 million	0.13% males 0.29% females
Schizophrenia	0.3% [0.2-0.4%]	20 million	0.26% male 0.25% females s
Alcohol use disorder	1.4% [0.5-5%]	107 million	2% males 0.8% females
Drug use disorder (excluding alcohol)	0.9% (0.4-3.5%)	71 million	1.3% males 0.6% females

Sumber: 2018. Mental Health, by Hannah Ritchie and Max Roser, <https://ourworldindata.org/mental-health>.

Tabel 1 membandingkan prevalensi gangguan kesehatan mental antara pria dan wanita. Pada sebagian besar negara, kelompok gangguan ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Namun, seperti yang ditunjukkan tentang penggunaan zat dan alkohol, ini bervariasi secara signifikan berdasarkan jenis gangguan. Sementara rata-rata, depresi, kecemasan, gangguan makan, dan gangguan bipolar lebih banyak terjadi pada wanita. Perbedaan gender dalam prevalensi skizofrenia beragam di seluruh negara, tetapi biasanya lebih umum pada pria.

Gangguan alkohol dan penggunaan narkoba lebih sering terjadi pada pria. Namun, sekitar 37 juta wanita di Eropa telah menggunakan obat terlarang setidaknya sekali seumur hidup mereka. Sekitar 100 ribu orang memasuki perawatan obat setiap tahun dan hampir 2 ribu meninggal akibat overdosis obat. Bahkan selama dekade terakhir, kesenjangan gender telah menyempit di antara generasi muda yang menggunakan narkoba. Hari ini, untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, EMCDDA merilis gambar gerak baru yang mengeksplorasi 'Mengapa gender penting dalam kecanduan narkoba. Wanita hanya mewakili seperlima dari klien dalam perawatan obat khusus, tetapi masalah mereka seringkali lebih kompleks daripada pria. Mereka cenderung berkembang lebih cepat menuju kecanduan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai 'telescoping'. Mereka juga mengalami gejala penarikan yang lebih parah dan melaporkan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Layanan untuk wanita dengan masalah penggunaan narkoba perlu mengatasi masalah unik ini dan bersikap ramah, tidak menghakimi, mendukung dan aman secara fisik dan emosional (Hannah Ritchie: 2018).

Penyalahgunaan narkoba yang menimpa seorang wanita, jauh menimbulkan efek yang lebih serius. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis atau psikologis. Berbagai riset menunjukkan, 70 persen penyalahgunaan narkoba pada wanita mengarah kepada masalah fisik dan seksual. Penyalahgunaan narkoba pada wanita terjadi karena trauma masa kecil dan latar belakang orangtua yang juga terkena alkohol dan obat-obatan. Banyak wanita yang menggunakan narkoba atau alkohol, telah menderita penganiayaan semasa kecil, termasuk penganiayaan secara fisik, emosional atau seksual. Karena hal inilah, akhirnya seorang wanita beralih kepada strategi yang kompulsif untuk menghadapi kenyataan yang ada, salah satunya adalah dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, tidak sedikit juga wanita yang mengatakan bahwa mereka mulai menggunakan narkoba karena ajakan dari pasangan atau teman pria mereka. Masalahnya, seringkali wanita yang menggunakan narkoba merasa lebih mempunyai kepercayaan diri akibat harga diri yang rendah. Dampak selanjutnya, wanita yang menjadi korban narkoba cenderung tidak berusaha mencari pengobatan. Hal itu dikarenakan besarnya rasa takut yang dimiliki mereka. Takut akan masa depan, takut akan teman-teman atau pasangan hidup, dan takut akan hukuman sosial yang akan menimpa (<https://bnn.go.id>: 2013).

Permasalahan narkoba menjadi rumit pada perempuan, baik pengguna narkoba maupun non pengguna. Bagi perempuan nonpengguna, nilai-nilai seksualitas yang ada akan menghadapi mereka pada perilaku seksual berisiko dengan pasangan yang kebetulan pengguna. Bagi perempuan pengguna, kondisi lebih buruk apabila terkait dengan masalah ekonomi, saat mereka sedang membutuhkan narkoba, akan sangat mungkin bersedia melakukan hubungan seksual dengan pemasok narkoba. Selain itu penggunaan narkoba juga terkait dengan isu perdagangan perempuan. Seluruhnya dapat beresiko pada penularan PMS dan HIV/AIDS (Purwatiningsih : 2001).

Sisi lain kebijakan narkotika di Indonesia dititikberatkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), yang masih sarat dengan nuansa kebijakan kriminal yang mengutamakan hukuman berupa pemenjaraan dan bahkan hukuman mati, dibandingkan dengan pendekatan kesehatan masyarakat (Institute for Criminal Justice Reform-ICJR).

Setiap tahun, jumlah perempuan yang hidup di dalam institusi penahanan kian meningkat seiring dengan kian meningkatnya pula tindak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setidaknya mencatat sepanjang tahun 2012-2015, rata-rata kenaikan jumlah tahanan perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 7,56% dan rata-rata kenaikan jumlah narapidana perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 8,67% (smlap.ditjenpas.go.id, diakses pada 31 Juli 2016, hasil olahan data oleh penulis). Posisi perempuan yang menjalani kehidupan di dalam institusi penahanan membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan penahanan memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup para tahanan dan narapidana tersebut. Tanggung jawab ini diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar, seperti sandang, pangan, papan, hingga kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupannya kelak ketika kembali ke dalam masyarakat, yakni seperti pembekalan pendidikan dan keterampilan kerja (Lisnawati: 2016).

Gerakan Sosial Menghadapi Napza

Teori gerakan sosial dari Smelser dalam Douglas (2005) menganjurkan bahwa setiap gerakan sosial itu diterima oleh masyarakat dan pemerintahnya agar terbuka terhadap perubahan yang diarahkan gerakan, sehingga gerakan tersebut menjadi efektif. Dalam hal ini kehadiran gerakan NA bisa berlangsung hingga saat ini, karena didukung adanya sikap dalam merespon peluang dan tantangan sebagai motivasi dalam menggerakkan organisasi. Baik secara sumber daya manusianya maupun kelembagaan. Pada akhirnya keberadaannya memberikan perubahan kepada masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya pada penjelasan Peggy Antrobus (2004 : 109-131) bahwa karakteristik gerakan perempuan adalah aktivis, kelembagaan dan pelibatan aspek lintas sektoral. Ketiganya dapat berjalan secara bertahap ataupun bersamaan. Berikut ini penulis menelaah ketiga karakteristik tersebut.

a. Strategi Aktivis NA

Strategi aktivis yaitu peningkatan kesadaran bersama sebagai upaya refleksi berbagai pengalaman penindasan berbasis gender berkaitan dengan persoalan penanganan kejahatan narkoba. Proses peningkatan kesadaran berdasarkan pengalaman seseorang dan pengalaman orang lain dapat menjadi alat analisis yang kuat, stimulus untuk tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah upaya mengidentifikasi pengalaman marginalisasi dan keterasingan dalam masyarakat patriarki. Peggy menjelaskan perempuan membutuhkan ruang pengorganisasian perubahan menuju keadilan gender membutuhkan ruang yang aman dengan pemikiran yang sama yang akan mengasah analisis kritis dan mengembangkan strategi.

NA bergerak terstruktur dari pusat hingga cabang (kecamatan) dan ranting (kelurahan/desa), dan berada di bawah payung besar Muhammadiyah. Potensi NA ini menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan akar rumput dan membangun kesadaran pada hal yang sama, termasuk persoalan kejahatan narkoba. Tahun 2017 NA memiliki kurang lebih 738 Cabang dan 681 Ranting, yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan.

Pada isu ini, NA Lampung dapat membuat tim khusus yang membahas tentang kerentanan kejahatan narkoba bagi perempuan dan anak. Tujuannya selain membangun kesadaran bersama juga menumbuhkan gerakan bersama memerangi narkoba. Lebih lanjut lagi dapat membentuk kaukus, yang menurut Peggy menjadi ruang yang tak tertandingi untuk pendidikan, analisis, solidaritas dan pembangunan gerakan. Kaukus dalam hal ini adalah perkumpulan antarkelompok yang memiliki fokus perhatian terhadap kejahatan narkoba. Di Lampung terdapat Kaukus Perempuan Lampung, yang tentu saja isu tentang kejahatan narkoba perlu disampaikan oleh PW NA Lampung. Kaukus Perempuan akan bekerja menghubungkan para stakeholder regional, nasional bahkan internasional terkait persoalan narkoba, dan memberikan kontribusi pada kebijakan bersama sebagai upaya pencegahan. Aliansi dan koalisi antara jaringan gerakan perempuan memperkaya advokasi dan memperluas jangkauan. Demikian jaringan hak asasi perempuan telah dikaitkan dengan jaringan perempuan pada kesehatan reproduksi, atau pada masalah ekonomi, secara berurutan untuk menggarisbawahi ketidakterpisahan hak asasi perempuan dan menekankan keterkaitan sipil, politik, sosial, dimensi ekonomi dan budaya semua hak asasi manusia. Konferensi global memberikan ruang penting bagi pengorganisasian perempuan, menghubungkan pekerjaan gerakan di tingkat lokal dan global. Upaya gerakan perempuan pada tahapan aktifis, juga membutuhkan aktifitas kampanye global yang digunakan gerakan perempuan terutama yang diorganisasikan oleh jaringan dengan tautan kuat antara pergerakan di tingkat lokal dan inisiatif di tingkat global. Kampanye seputar isu-isu lokal lebih mudah diorganisir dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah kampanye menentang mutilasi genital di beberapa bagian Afrika, melawan berakhirnya mahar di India, dan perlindungan hak-hak reproduksi di beberapa bagian Amerika Latin.

Terbukanya akses informasi berbasis teknologi akses informasi kian hari semakin terbuka lebar. Ini dapat memberikan peluang besar bagi kader NA untuk memperluas dakwah dan gerakan organisasinya ke seluruh penjuru baik di kancah nasional maupun Internasional. Sarana informasi dan teknologi yang terbuka lebar akan dapat mendukung jaringan kerjasama NA semakin terbuka di seluruh penjuru. Dalam konteks ini NA bisa memanfaatkan sarana IT sebagai dakwah multimedia, sarana IT bisa menjadi sarana dakwah media yang berdampak positif dalam menjalankan dakwah dan gerakan advokasinya secara luas.

Selanjutnya, membangun jaringan telah menjadi salah satu strategi gerakan perempuan di semua tingkatan. Mungkin bisa dikatakan bahwa melalui jaringan itulah gerakan perempuan

global muncul. Gerakan perempuan global, sebagaimana diwakili oleh jaringan, mungkin juga dikonseptualisasikan sebagai kampanye yang sedang berlangsung untuk hak dan pemberdayaan perempuan. Peluang kerjasama baik dari donor maupun pemerintah termasuk dana CSR di masing-masing daerahnya, adalah sangat penting dilakukan NA, meski di sisi lain kemandirian gerakan juga tetap dibutuhkan. Muhammadiyah sendiri pun telah membangun kemandirian melalui potensi lembaga filantropinya yaitu Lazismu, yang dapat menjadi sumber pedanaan bagi pelaksanaan program gerakan. Artinya, NA proaktif membaca peluang ini.

b. Kelembagaan

Kelembagaan NA harus berfungsi sebagai pengarusutamaan dan pemantauan kebijakan pemerintah dan program untuk memastikan akuntabilitas. Mainstreaming atau strategi pengarusutamaan adalah mengintegrasikan kerangka kerja, agenda, temuan dan strategi ke dalam kebijakan arus utama, program dan proyek - semakin banyak digunakan memajukan keprihatinan perempuan.

Namun, efektivitas strategi ini beragam. Bekerja untuk mengarusutamakan kepedulian perempuan mengarah pada hal yang tak terhindarkan tingkat birokratisasi yang mendepolitisasi. Mengidentifikasi prioritas kebijakan responsif gender dan dampak pada sektor-sektor penting untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan [dan dalam] reformasi institusi untuk menetapkan hak dan peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki; membina pembangunan ekonomi untuk memperkuat insentif sumber daya dan partisipasi yang setara; dan mengambil tindakan aktif untuk memperbaiki kesenjangan dalam komando atas sumber daya dan suara politik.

NA menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pimpinan baik berupa pelatihan dalam perkaderan formal maupun non formal. Pelatihan ini akan menambah wawasan kader dan memantik semangat untuk memajukan gerakan. Komitmen kaderisasi NA adalah memiliki kader yang loyal terhadap organisasi, hal tersebut terlihat dari besarnya semangat volunteerisme kader.

Pada persoalan pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender NA bersinergi dengan pemerintah. Baik NA maupun pemerintah akan diringankan apabila bisa bersinergi dengan baik dalam menjalankan kebijakan pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam penanganan kejahatan narkoba di lingkup perempuan dan anak, mengingat kerumitan dan dinamika persoalan yang ada, NA membutuhkan penguatan kajian dari sisi perspektif keadilan gender. Hal ini sewajarnya dilakukan NA menjelang kiprah 1 abadnya, untuk memberikan kajian terhadap persoalan apapun dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang dirumuskan oleh NA.

c. Strategi Lintas Sektoral

NA sebagai sebuah gerakan, harus memiliki strategi berbasis penelitian, analisis, dan advokasi. Penelitian dan analisis telah menjadi dasar advokasi, yang sampai batas tertentu telah efektif dalam mengubah undang-undang serta beberapa praktik dan sikap. Kapasitas Pimpinan NA merupakan kader terpelajar dengan tingkat pendidikan minimum adalah diploma dan separuh lebih bergelar sarjana dengan berbagai keahliannya. Sebagai seorang kader yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, berpotensi menjadi garda depan dalam merespon berbagai permasalahan umat dan bangsa terutama yang berkenaan dengan permasalahan agama dan sosial terutama perempuan dan anak.

Kondisi geografis setiap daerah berbeda, tentunya berdampak pada karakteristik kekhasan lokal daerah tersebut dalam menentukan program kerja, karena bisa jadi karakteristik obyek dakwah pun berbeda. Perlu adanya pemetaan obyek dakwah dan *need assessment* dari obyek dakwah agar gerakan dakwah NA benar-benar dapat menyentuh kebutuhan spiritual anggotanya. Tentunya dalam merespon maraknya kejahatan narkoba yang menjadi salah satu sasaran Pimpinan Pusat NA, maka masing-masing pimpinan wilayah mengkoordinasi daerah, cabang hingga ranting mengidentifikasi poin persoalan tersebut, sehingga menjadi bahan bagi pimpinan wilayah untuk membuat program pencegahan, penanganan, dan advokasi perempuan terhadap persoalan narkoba.

Tanfidz Keputusan Muktamar Nasyyiatul Aisyiyah Ke XIII memprioritaskan seperti model advokasi kesehatan pada remaja melalui PASHMINA (pelayanan remaja sehat milik Nasyyiatul Aisyiyah, Samara Course, pendidikan pra nikah, Parenting Club dan lain sebagainya. Selain itu, NA memiliki berbagai bidang kerja. Dalam penanganannya, membutuhkan sinergisitas

antarbidang baik dakwah, organisasi, kader, ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. Dalam program-program tersebut, NA wilayah dan seterusnya dapat merumuskan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Tentunya membutuhkan riset yang dapat mengidentifikasi persoalan masyarakat Lampung, sehingga hal itu menjadi pertimbangan program kerja dan ruang pengabdian NA. Salah satu tantangan keamanan di Provinsi Lampung adalah kejahatan narkoba. Ini layak menjadi perhatian utama NA, dan gerakan perempuan sangat strategis memutus mata rantai penyebab kerentanan ini.

PENUTUP

Perlawanan NA terhadap kejahatan narkoba sudah sejak periode 1980-1984. Kerentanan persoalan narkoba yang semakin merebak dan kasus dalam jumlah tinggi, membutuhkan konsistensi NA membangun gerakan kesadaran bersama perlawanan terhadap narkoba, yang terlihat pada semua program, dan semua bagian struktur organisasi NA.

Adapun saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. NA membutuhkan pisau analisis dalam menentukan solusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi terutama kepada perempuan dan anak, diantaranya kerentanan perempuan dan anak terhadap kejahatan narkoba. Putusan-putusan Tarjih seperti Adabul Mar'ah fil Islam, Fiqh Perempuan, dan Panduan Keluarga Sakinah yang telah dibahas secara nasional oleh Muhammadiyah dapat menjadi rujukan bagi NA.
2. Pimpinan wilayah mengkoordinasikan pimpinan daerah, cabang dan ranting membuat tim khusus yang fokus perhatiannya pada persoalan kerentanan perempuan dan anak pada kejahatan narkoba. Masing-masing wilayah kerja merekapitulasi kondisi kerentanan di daerahnya terhadap persoalan tersebut. Sekaligus merumuskan solusi bagi daerahnya.
3. Perhatian pada persoalan kerentanan perempuan dan anak terhadap kejahatan narkoba sebaiknya selaras pada Arah Kebijakan Program NA Tahun 2016- 2020 "Membangun Eksistensi Gerakan Perempuan Muda Islam Berkemajuan melalui Advokasi dan Peningkatan Kompetensi kader". Arah kebijakan ini diukur dengan 3 indikator utama berikut: berpikir kritis (*critical thinking*), mampu menganalisis dan dapat merespon secara cepat dan tepat (*responsive*) terhadap situasi dan kondisi yang berkembang. Kedua, massifnya publikasi dalam bentuk bilingual agar dikenal di dunia internasional. Ketiga, menggiatkan advokasi berbasis nilai profetik, yaitu aspek-aspek humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*amana billah*) dalam nilai-nilai profetik.

Handayani:
Kajian Peluang
Pimpinan
Nasyiatul Aisyiyah
Lampung dalam
Pencegahan...

48

REFERENSI

- Antrobus, Peggy. (2004). *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*. New York. Zedbooks.
- Bevington, Douglas, & Chris Dixon. (2005). *Social Movement Studies*, Vol. 4, No. 3, 185–208, December 2005. Routledge.
- Marison, Walda. (2018). BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/25/10215681/bnn-sepanjang-2018-2-juta-mahasiswa-dan-15-juta-pekerja-terlibat-narkoba>.
- Lisnawati, Lilis, Nadia Utami L., & Gatot Goei. (2016). *Woman Behind The Bars: Realitas Kehidupan Narapidana Perempuan Di Indonesia*. Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan). Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Priyasmoro, Muhammad Radityo. (2018). *BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017*. <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>. 26 Juni 2018.
- Purwatiningsih, Sri. (2001). *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Populasi 12 (1) 2001.
- Ritchie, Hannah, Max Roser. (2018). *Mental Health*. <https://ourworldindata.org/mental-health>.
- _____. (2019). *Sistem Data Base Masyarakat*. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039>. Akses pada 15 Maret 2019.

- _____. (2013). Efek Narkoba Pada Wanita Lebih Besar. <https://bnn.go.id/blog/artikel/efek-narkoba-pada-wanita-lebih-besar/>. 18 April 2013. Akses pada 15 Maret 2019.
- _____. (2016). *Bahaya! Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkotika*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempu-an-indonesia-rawan-iadi-pengedar-narkotika>. Selasa, 23 Februari 2016. Akses pada 15 Maret 2019.

Handayani:
Kajian Peluang
Pimpinan
Nasyiatul Aisyiyah
Lampung dalam
Pencegahan...

